

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena politik kartel dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ciamis tahun 2024, di mana pasangan calon Herdiat-Yana memperoleh dukungan luas dari hampir seluruh partai politik, termasuk partai-partai yang sebelumnya berposisi sebagai oposisi. Konfigurasi politik semacam ini menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi demokrasi elektoral dan fungsi ideal partai politik dalam sistem demokrasi lokal. Dalam teori demokrasi, partai politik seharusnya menjadi saluran utama aspirasi rakyat serta penyedia alternatif politik. Namun dalam kasus ini, kecenderungan partai-partai untuk berkoalisi tanpa kompetisi justru mencerminkan karakteristik politik kartel, yakni kolaborasi antarpolitical untuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan kepentingan bersama, sekaligus meminimalisasi persaingan politik yang sehat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi guna memperoleh pemahaman mendalam atas pengalaman, persepsi, dan makna yang dikonstruksikan oleh para aktor politik yang terlibat dalam proses ini. Studi ini dibingkai dengan teori partai kartel (Katz & Mair; Ambardi 2009), konsep demokrasi elektoral (Held; Asshiddiqie 1995), serta teori kekuatan politik (Miriam Budiardjo 2003). Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dinamika di balik konstelasi dukungan partai politik di tingkat lokal, serta melihat implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal. Sebagai proposal, penelitian ini bertujuan memberikan dasar konseptual untuk memahami praktik politik elit di daerah serta memperkaya wacana tentang penguatan demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan pasangan Herdiat-Yana dalam Pilkada Ciamis 2024 merupakan bentuk kartelisasi politik, ditandai dengan dukungan penuh dari 18 partai politik tanpa adanya lawan politik lain. Seluruh partai memilih berkoalisi dan mengamankan kekuasaan bersama, bukan bersaing secara elektoral. Kondisi ini memperlemah kualitas demokrasi karena menghilangkan pilihan alternatif bagi pemilih. Fenomena ini sesuai dengan konsep politik kartel Saiful Mujani Ambardi, di mana partai berfungsi sebagai alat kompromi elite. Gerakan kotak kosong muncul sebagai respon terhadap dominasi kekuasaan tersebut, menjadi simbol korektif atas mandeknya kompetisi demokratis.

Kata Kunci: Pilkada, Politik Kartel, Demokrasi Elektoral, Partai Politik, Kabupaten Ciamis

ABSTRACT

This research aims to explore the phenomenon of cartel politics in the 2024 regional head election (Pilkada) in Ciamis Regency, where the Herdiat-Yana candidate pair received widespread support from almost all political parties, including those previously positioned in opposition. This political configuration raises questions about the state of electoral democracy and the actual function of political parties in a local democratic context. The study focuses on how political parties, which are ideally expected to offer political alternatives and channel public aspirations, instead show signs of consolidation and collusion in support of a single candidate. Such patterns may reflect the characteristics of cartel politics, where inter-party collaboration serves to secure mutual interests and maintain existing power structures rather than promote democratic competition.

This research adopts a qualitative method with a phenomenological approach to gain an in-depth understanding of the experiences, perceptions, and meanings constructed by political actors involved in the process. The study is framed by the theoretical perspectives of cartel party theory (Katz & Mair; Ambardi 2009), the concept of electoral democracy (Held; Asshiddiqie 1995), and the theory of political power (Miriam Budiardjo 2003). The research seeks to uncover the dynamics behind party alignment in the local political landscape and examine how these alignments affect the quality of local democracy. This proposal is intended to provide a conceptual foundation for understanding the implications of elite-driven politics at the regional level and to contribute to the discourse on strengthening democratic practices in Indonesia.

The research finds that the victory of Herdiat-Yana in the 2024 Ciamis regency election represents a form of political cartelization, marked by full support from 18 political parties and the absence of any opposing candidates. All parties chose to form a coalition to secure shared power rather than compete electorally. This situation undermines the quality of democracy by eliminating alternative choices for voters. The phenomenon aligns with Saiful Mujani Ambardi's concept of cartel politics, where parties act as instruments of elite compromise. The "empty box" movement emerged as a symbolic response to this dominance, serving as a corrective force against the stagnation of democratic competition.

Keywords: *Regional Election, Cartel Politics, Electoral Democracy, Political Parties, Ciamis Regency*